**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMARNDA UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Oleh

Sudarmanto

15.11.1001.3509.050

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email: Sudarmanto190@yahoo.com

**ABSTRAK**

 Sudarmanto, 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah bimbingan Drs. H. Maskan, AF, M.Si. selaku Pembimbing I dan Drs. Ghufron, M.Si. selaku Pembimbing II.

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengdeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pembanguan fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur, untuk menganalisis dan mengdeskripsikan faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur.

Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik yang meliputi memberikan gagasan, proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah Sekertaris Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur selaku *key informan,* Kaur Pembangunan dan masyarakat Desa Sukorejo selaku *informan* yang dipilih secara *accidental sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis data model interaktif*.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur belum cukup memuaskan, ada beberapa faktor penghambat yg mempengaruhi Pembangunan Fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dibuktikan dengan 4 (empat) indikator yang menjadi fokus penelitian yaitu: faktor kurangnya perencanaan dalam mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan pembangunan, kurangnya partisipasi masyarakat Desa Sukorejo dalam kegiatan gotong royong di lingkungan desa dikarenakan sibuk bekerja, ketidaktersediaan atau kurangnya bahan bangunan karena keterbatasan dana / biaya untuk melaksanakan pembangunan fisik, serta pengurus desa yang berperan dalam pengelolaan pembangunan fisik Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri memiliki latar pendidikan yang rendah, berakibat pada persoalan pola kerja dari pejabat pemerintahan desa yang kurang memahami pedoman/prosedur kerja yang sudah ditetapkan.

***Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur.***

1. **PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Bab VI pasal 63 tentang Perencanaan Pembangunan Desa pada ayat 1 menyatakan bahwa “dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota”

Lebih lanjut pada ayat 2 menyatakan bahwa “ perencanaan pembangunan desa sebagaimana pada ayat (1) disusun partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelanggaraan pembangunan desa diwajibkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan dapat dilihat secara nyata dari keberhasilan suatu negara dan bangsa indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik daerah masing-masing. Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah, disebutkan bahwa kecamatan adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan kecamatan sebagai perangkat pemerintahan daerah dibawah kabupaten dimaksud dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, sebagai dasar perkiraan dalam Undang-undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, Undang-undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan daerah kota sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk serta melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sukorejo meluncurkan program pembangunan yang berupaya memancing partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Proyek Pembangunan Desa Tertinggal (P2DT) merupakan proyek pembangunan desa yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dan Pembangunan Wilayah Kecamatan Terpadu (PWKT) diluncurkan oleh beberapa pemerintah untuk merangsang partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Kedua proyek tersebut pada prinsipnya memberikan rangsangan dana secara stimultan untuk pembangunan fisik desa tanpa dianggarkan dana upah kerja dan pengawasan dalam pelaksanaan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini, diharapkan munculnya partisipasi masyarakat berupa tenaga kerja.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sukorejo berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan masih belum optimal, Desa Sukorejo memiliki warga sekitar 1.132 jiwa tetapi banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam pelaksanan gotong royong. Dari 1.132 jiwa hanya sekitar 113 atau hanya 10% dari masyarakat yang ada, dikarenakan masyarakat setempat bekerja atau buruh pada perkebunan, berkebun di ladang dan beraktivitas dari pagi sampai sore hari, akibatnya masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan gotong royong. Adapun rapat yang diadakan sebulan sekali untuk pelaksanaan gotong royong terkadang masyarakat kurang antusias untuk menghadiri rapat tersebut walaupun itu dilaksanakan pada malam hari. Aktivitas kendaraan seperti mobil besar (track) yang melewati jalan desa setiap hari menggakibatkan sebagian jalan rusak. Selain itu juga sarana dan prasarana yang ditunjukan kepala desa setempat contohnya seperti, sarana kesehatan dan sarana pendidikan belum memadai.

Partisipasi adalah keterlibatan setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan keputusan yang menjangkau kepentingan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Partisipasi sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Sejak diresmikannya desa Sukorejo, bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Sukorejo dalam pembangunan Desa Sukorejo masih rendah, jelas banyak persoalan yang menghambat dan menggagalkan pembangunan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat terlihat antara lain:

Kurangnya perencanaan dalam mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan pembangunan, kurangnya partisipasi masyarakat Desa Sukorejo dalam kegiatan gotong royong di lingkungan desa dikarenakan sibuk bekerja, ketidaktersediaan atau kurangnya bahan bangunan karena keterbatasan dana / biaya untuk melaksanakan pembangunan fisik, serta pengurus desa yang berperan dalam pengelolaan pembangunan fisik Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri memiliki latar pendidikan yang rendah, berakibat pada persoalan pola kerja dari pejabat pemerintahan desa yang kurang memahami pedoman/prosedur kerja yang sudah ditetapkan.

Dari persoalan tersebut membuat tingkat pembangunan di desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur masih rendah, hal tersebut juga dapat terlihat dari beberapa faktor-faktor antara lain:

1. Rencana-rencana pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat belum terwujud sebagai mana mestinya.
2. Pembangunan fisik belum terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
3. Prasarana-prasarana sosial jumlahnya masih terbatas.

Aspek masyarakat merupakan masalah besar yang dihadapi dalam memberdayakan masyarakat, ketidaktahuan dikalangan masyarakat harus diterobos agar masyarakat dibangkitkan kesadarannya bahwa ada kehidupan yang lebih baik dari sekarang dan adanya harapan serta peluang untuk memperbaiki kehidupan tetapi untuk itu harus ada usaha dari diri sendiri, ini menyangkut masalah mental, pengetahuan kecakapan dan juga kesejahteraan sumber daya manusia, juga masalah sistem dan perorganisasian termasuk tatanan fungsi, prosedur, dan sebagainya dari aparat pemerintah sebagai aparat pembangunan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah karena peran seluruh komponen bangsa juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu pembangunan. Peran pemerintah saat ini hanya sebagai *fasilitator, regulator, motivator* dalam penyedian prasarana publik. Kaho(2003:128) Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dianggap dapat mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi. Tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah khususnya tidak seiring dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur”.**

1. **DASAR TEORI**
2. **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik**

Partisipasi masayarakat dalam pembangunan fisik adalah keterlibatan secara aktif yang meliputi Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan fisik, Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan fisik.

Berikut adalah hasil wawancara pada tanggal 15 Agustus 2019 yang dilakukan penulis kepada Bapak Drs. H. Abu Nawas selaku Sekertaris Desa, beliau mengatakan bahawa:

“Partisipasi masayarakat dalam kegiatan pembangunan fisik kurang mendapat respon dari masyarakat karena masyarakat Desa Sukorejo lebih memilih bekerja sebagai buruh dan berkebun dibandingkan menghadiri kegiatan musyawarah, adapun masyarakat yang mengikuti musyawarah tidak paham dalam menyampaikan aspirasi ataupun pendapat sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik.

Kemudian masyarakat, Bapak Jaka Winata pada tanggal 15 Agustus 2019 mengatakan:

“Masyarakat di Desa Sukorejo lebih banyak berkebun dan bekerja sebagai buruh dan lebih mementingkan pekerjaan mereka dibandingkan mengikuti musyawarah, jika diadakan musyawarah pada malam hari banyak masyarakat lebih memilih untuk beristirahat”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Sukorejo kurang mendapatkan respon karena masyarakat lebih memilih bekerja sebagai buruh dan berkebun, masyarakat lebih memilih beristirahat dibandingkan mengikuti musyawarah pada malam hari . Adapun masyarakat yang mengikuti musyawarah tidak paham dalam menyampaikan aspirasi ataupun pendapat sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembanguanan fisik.

Metode yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah berupaya memperoleh informasi mengenai proses pembangunan fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur, melalui pengajuan pertanyaan kepada key informan dan informan /responden terkait dengan fokus penelitian, yang terurai masing-masing sebagai berikut:

1. **Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur.**
2. **Faktor Penghambat**

Dalam pembangunan fisik di Desa Sukorejo ditemukan berbagai faktor yang menghambat dalam pembangunan fisik. Faktor penghambat dalam pembangunan fisik adalah tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sukorejo yang kurang memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam proses pembangunan fisik, anggaran dana yang terbatas yang berakibat terhambatnya pembangunan di Desa Sukorejo, seperti halnya yang diungkapkan oleh Drs. H. Abu Nawas selaku Sekertaris Desa melalui wawancara pada tanggal 15 Agustus 2019, beliau mengatakan:

“Penghambat dalam pembangunan fisik di Desa Sukorejo disebabkan oleh keterbatasan dana yang didapat dari bantuan masyarakat maupun dari pemerintah sehingga didalam pengelolaan pembangunan fisik menjadi terhambat dan belum optimal”

Selanjutnya, wawancara kepada Bapak sudirman selaku Kaur Pembangunan pada tanggal 24 Agustus 2019, beliau mengatakan:

 “permasalahan yang terjadi adalah sulitnya merubah pola pikir masyarakat yang sebagian besar masih banyak mengusulkan barang atau bantuan untuk kelompok atau golongan tertentu bahkan kepentingan pribadi”.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ibu Likun Ajang selaku masyarakat Desa Sukorejo, melalui wawancara

 “Pengurus Desa yang berperan dalam pengelolaan pembangunan fisik Desa Sukorejo itu sendiri memiliki latar pendidikan yang rendah, berakibat pada persoalan pola kerja dari pejabat pemerintahan desa yang kurang memahami pedoman/prosedur kerja yang sudah ditetapkan, sehingga ketika pejabat pemerintah desa yang baru menerapkan seluruh pedoman/prosedur yang ada mendapatkan protes dari masyarakat”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pembangunan fisik yaitu faktor penghambat dalam pembangunan fisik di Desa Sukorejo disebabkan oleh keterbatasan dana yang didapat dari bantuan masyarakat maupun dari pemerintah dan permasalahan yang terjadi adalah sulitnya merubah pola pikir masyarakat yang sebagian besar masih banyak mengusulkan barang atau bantuan untuk kelompok atau golongan tertentu bahkan kepentingan pribadi, Pengurus Desa yang berperan dalam pengelolaan pembangunan fisik Desa Sukorejo itu sendiri memiliki latar pendidikan yang rendah.

Beberapa faktor di atas merupakan faktor yang menghambat pembangunan fisik di Desa Sukorejo

1. **Pembahasan**

Pembangunan Fisik di Desa Sukorejo Sumber : Sekretaris Desa Sukorejo Kota Samarinda pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip yang menekan pada nilai-nilai partisipasi masyarakat dan nilai sosial yang belum optimal sebab, kurangnya perencanaan dalam mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan pembangunan di Desa Sukorejo Sumber : Sekretaris Desa Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur dan ketidaktersediaan atau kurangnya bahan bangunan karena keterbatasan dana / biaya untuk melaksanakan pembangunan fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur menjadi terhambat.

Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Sukorejo yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam hal ikut serta dalam pembangunan fisik sehingga masyarakat lebih memilih untuk memberikan

wewenang kepada kaur pembangunan untuk melakukan pembangunan fisik di bandingkan bergotong royong yang merupakan suatu kendala dalam proses pembangunan dan keterbatasan anggaran dana yang membuat pelaksanaan pembangunan terhambat sehingga banyaknya pembangunan yang terbengkalai dan belum optimal. Pengurus Desa yang berperan dalam pengelolaan pembangunan fisik Desa Sukorejo itu sendiri memiliki latar pendidikan yang rendah, berakibat pada persoalan pola kerja dari pejabat pemerintahan desa yang kurang memahami pedoman/prosedur kerja yang sudah ditetapkan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Abe, Alexznder. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif.* Solo : Penerbit Pondok Edukasi.

Dwipayana, Ari. 2001. *Membangun Good Governance Di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.

Effendi, Bacthiar, 2002. *Pembangunan daerah Otonomi Berkeadilan,* Jakarta: PT. Uhindo dan Offset.

Umar, Husen. 2002. *Metode Riset Bisnis.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipator Berbasis Aset Komunitas: dri Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP UI Press.

Kaho, Josef Riwu, 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelanggaraan,* Jakarta:PT. Raja Grapindo Persada.

Sasono, A. 1997. *Pembangunan Perekonomian Rakyat.* Jakarta: Republik.

Satori, Djam’an dan Aan Komariah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan. Konsep Dimensi dan Strateginya.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sumarto, Hetifah. Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jakarta: SUN.

Suryono, Agus. 2001. *Teori dan isu Pembangunan.*Malang: UM-Press.

Tarigian, Robinson. *Perencanaan Pembangunan Wilayah.* Jakarta: Askara.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2002. *Perencanaan Pembangunan,* Jakarta:PT. Gunung Agung.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2002. *Peranan Kebudayaan Politik dan Kebudayaan Administrasi Di Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi UGM.

Yuwono, Teguh, 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru,* Semarang: Clogapps Diponegoro Univercity.

Maran, Rafael Raga. 2001. *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif IlmuBudaya Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

Patton, Andri. 2005. *Peran Informal Leader Dalam Pembangunan Desa di Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau.* Malang: Universitas Brawijaya.